

Wawasan Tata Ruang

Oleh Djoko Sujarto

Perkembangan Persepsi Spasial

Persepsi keruangan sebenarnya sudah dikenal sejak jaman prasejarah. Bagaimana manusia membutuhkan ruang dan menata ruang sesuai dengan kebutuhan kehidupannya telah dibuktikan di dalam rangkaian perkembangan peradaban manusia (Mumford, 1955).

Pada jaman prasejarah, dengan kemampuan pengetahuan dan teknologi yang masih sangat rendah manusia berusaha untuk menempatkan dirinya dalam ruang yang secara fisik memenuhi kebutuhannya. Maka gua gua pada dinding dinding bukit telah dimanfaatkan sebagai ruang tempat tinggal (Gallion, 1980).

Pada masa masa kemudian perkembangan peradaban, ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah mendorong manusia untuk menata kebutuhan ruang secara lebih baik. Maka pada jaman jaman selanjutnya sebagaimana yang ditunjukkan pada masa masa Yunani, masa Mesir kuno dan masa masa abad pertengahan telah berkembang pula bentuk bentuk tatanan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupan manusia (Gallion, 1980).

Persepsi terhadap ruang pada dasarnya dimulai dengan skala tinjauan yang sangat terbatas sehingga wawasan terhadap ruangpun terbatas pula. Suatu tatanan ruang diartikan sebagai suatu tempat yang dibatasi oleh bidang bidang tertentu

yang membatasi tempat hidup. Pada permukaan bumi yang dianggap sebagai tempat yang tidak terbatas (infinite place) seakan akan tidak terdapat ruang (Wingo, 1965; Lynch, 1968; Chadwick, 1980).

Permukaan bumi sebagai bagian dari jagad raya tidak dianggap sebagai suatu ruang melainkan hanya merupakan tempat di mana terdapat berbagai bentuk tatanan ruang.

Sejalan dengan perkembangan manusia serta peradaban, ilmu dan teknologi, maka persepsi yang demikian terhadap 'keruangan' di bumi ini telah menimbulkan berbagai permasalahan sehubungan dengan perkembangan yang terjadi di permukaan bumi sendiri, di ruang angkasa maupun di bagian dalam bumi.

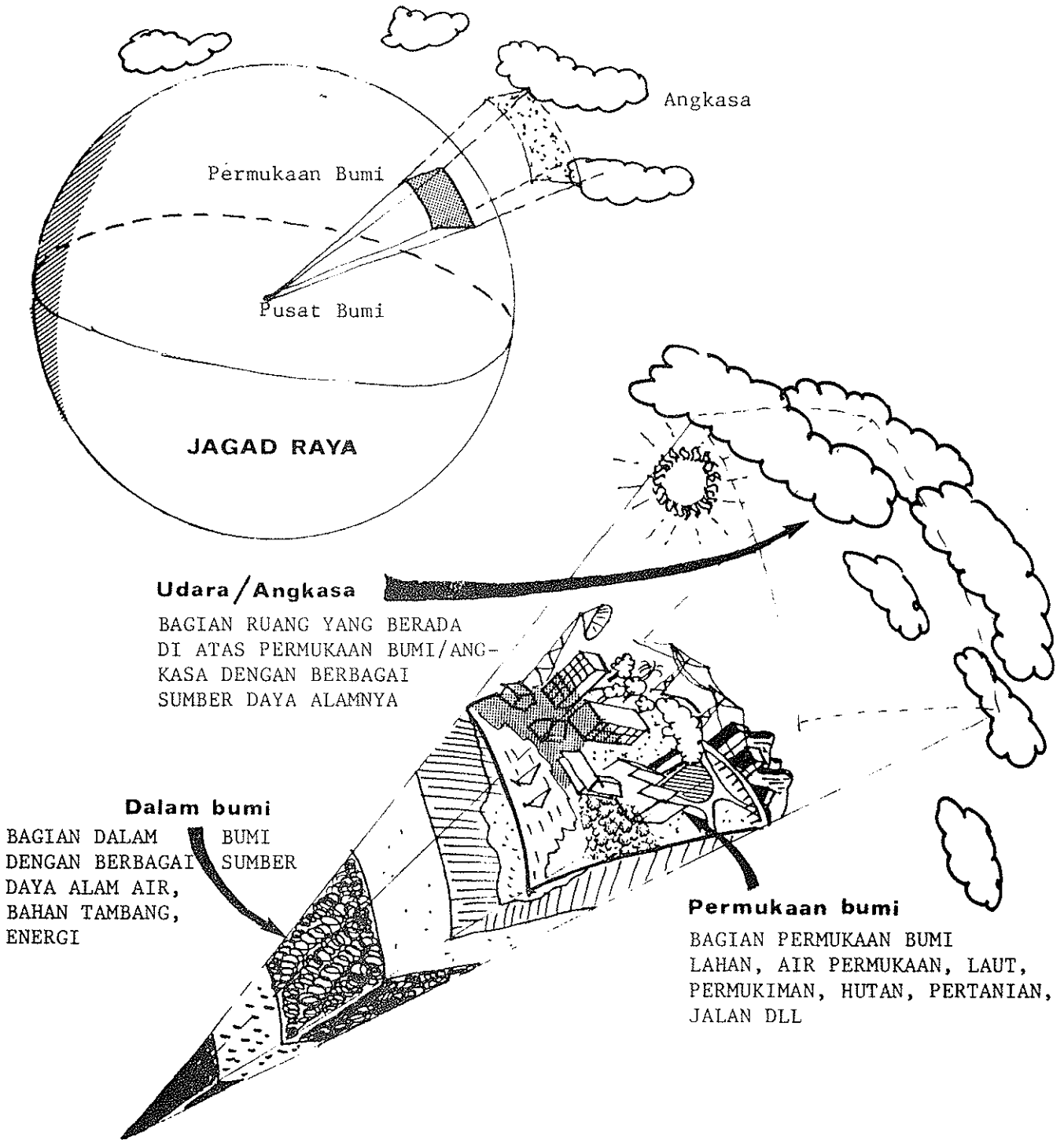
Pemanfaatan berbagai sumber daya alam dipermukaan bumi telah berakibat kepada segala sesuatu yang ada di angkasa maupun di bagian dalam bumi. Perubahan yang terjadi di angkasa berpengaruh terhadap keadaan di permukaan bumi maupun di bagian dalam bumi.

Pemanfaatan berbagai sumber daya alam di perut bumi berdampak terhadap keadaan permukaan bumi maupun angkasa.

Maka menghadapi perkembangan ini telah berkembang pula persepsi terhadap 'keruangan' (spasial) ini dengan berkembangnya suatu

• **Djoko Sujarto**, adalah staf pengajar Jurusan Teknik Planologi ITB dan anggota Dewan Redaksi Jurnal PWK

WAWASAN TATA RUANG



Udara / Angkasa

BAGIAN RUANG YANG BERADA DI ATAS PERMUKAAN BUMI/ANGKASA DENGAN BERBAGAI SUMBER DAYA ALAMNYA

Dalam bumi

BAGIAN DALAM BUMI DENGAN BERBAGAI SUMBER DAYA ALAM AIR, BAHAN TAMBANG, ENERGI

Permukaan bumi

BAGIAN PERMUKAAN BUMI LAHAN, AIR PERMUKAAN, LAUT, PERMUKIMAN, HUTAN, PERTANIAN, JALAN DLL

Tata Ruang ADALAH WUJUD STRUKTURAL DAN POLA PEMANFAATAN RUANG YANG MERUPAKAN WADAH KEHIDUPAN YANG MENCAKUP RUANG DARATAN, RUANG LAUTAN, RUANG UDARA TERMASUK DI DALAMNYA TANAH, AIR, UDARA DAN BENDA LAINNYA SERTA DAYA, KEADAAN, SEBAGAI SUATU KESATUAN WILAYAH TEMPAT MANUSIA DAN MAHLUK HIDUP LAINNYA MELAKUKAN KEGIATANNYA DAN MEMELIHARA KELANGSUNGAN HIDUPNYA.

Ms. 91

'wawasan tata ruang' yaitu yang melihat bagian bagian jagad raya sebagai suatu 'ruang relatif' (relative space) yang secara integral meliputi bagian dalam bumi, bagian permukaan dan bagian angkasa sebagai suatu kesatuan yang saling terkait satu sama lain.

Wawasan Tata Ruang

Sebagai suatu perjanjian terminologis, maka sebagaimana umumnya yang dipergunakan paling sedikit oleh kalangan perencana wilayah dan kota. 'Tata Ruang' merupakan suatu artian harfiah dari kata 'Spatial' yaitu segala sesuatu yang dipertimbangkan berdasarkan keruangan

Karena tujuan pokok dari penelitian ini akan menyangkut hal hal yang berkaitan dengan 'Kinerja Tata Ruang' (Spatial Performance) permukiman Kota Baru Metropolitan, maka komitmen utama dari pembahasan di bagian ini akan merupakan eksplorasi dari apa yang diartikan sebagai 'Struktur Tata Ruang Kota'. Dengan demikian maka bahasan ini juga akan memulai dengan suatu komitmen yang menekankan tinjauan kepada aspek lingkungan fisik

Sekalipun demikian tetap akan bertolak dari suatu anggapan bahwa tatanan tata ruang (spatial arrangement) yang diartikan oleh Chadwick sebagai: 'The arrangements of space or in space of all kinds' (Chadwick, 1981), bukanlah suatu sistem tertutup atau closed system melainkan suatu sistem yang menyangkut pula hal hal yang non fisik (Foley, 1967).

Untuk memperoleh wawasan pengertian tata ruang ini maka pembahasan ini akan menyoroti dua hal yaitu tinjauan yang menyangkut tata ruang sebagai wadah dan komponen tata ruang (spatial components) sebagai pembentuk pola tata ruang.

Tatanan Ruang

Tata Ruang terkait dengan suatu penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan.

'Tata Ruang' pada hakekatnya merupakan lingkungan fisik dimana terdapat hubungan organisatoris antara berbagai macam obyek dan manusia yang terpisah dalam ruang tertentu (Rapoport, 1980).

Di dalam 'tata ruang' terdapat suatu distribusi dari tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai

tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya. Tata Ruang dalam hal ini menurut Wetzling, merupakan jabaran dari suatu produk perencanaan fisik (Wetzling, 1978).

Dengan perkataan lain tinjauan pengertian struktur tata ruang harus tetap mengacu kepada suatu wawasan yang lebih luas (Webber, 1967).

Selanjutnya Donald Foley (Foley, 1964 ; 1967) beranggapan bahwa kerangka konsepsi tata ruang meluas menyangkut suatu wawasan yang di sebut sebagai wawasan a-spatial (bukan ketata ruangan). Hal ini karena kenyatannya struktur fisik sangat ditentukan dan dipengaruhi pula oleh faktor faktor non fisik seperti organisasi fungsional, pola budaya dan nilai kehidupan komunitas (Wheaton, 1967 ; Porteous, 1977).

Pemikiran yang kemudian berkembang sehubungan dengan wawasan tata ruang ini adalah suatu teori yang dapat menjembatani wawasan tatanan tata ruang yang umumnya menjadi pemikiran para perencana kota dengan wawasan tatanan bukan ke tata ruangan yang umumnya menjadi pemikiran para ahli ilmu dan falsafah sosial.

Dalam wawasan kaitan antara aspek 'keruangan (spatial)' dan 'bukan keruangan (a-spatial)' inilah kemudian Foley mengemukakan bahwa penataan ruang akan dilandasi oleh suatu paradigma dimana terdapat kaitan antara 3 aspek yaitu (Foley, 1964;1967):

1. **Aspek normatif** yang bersifat aspatial seperti nilai sosial budaya, institusi, peraturan dan perundangan, teknologi dan spatial, termasuk distribusi tata ruang dari pola budaya, nilai yang berkaitan dengan pola tata ruang aktivitas, dan lingkungan fisik
2. **Aspek fungsional** yang bersifat aspatial, seperti pembagian dan agihan fungsi fungsi, sistem aktivitas termasuk manusia dan kegiatan usaha di dalam peranan fungsionalnya dan spatial, seperti distribusi tata ruang fungsi fungsi, kaitan tata ruang, pola tata ruang kegiatan berdasarkan macam macam fungsi.
3. **Aspek fisik** yang bersifat aspatial, seperti obyek obyek fisik, lingkungan geofisik, lingkungan angkasa, kualitas lingkungan (permukaan, dalam bumi dan angkasa) manusia sebagai wujud fisik, kualitas sumber daya alam dan yang bersifat spatial seperti distribusi tata ruang bentuk fisik, lahan, bangunan, jaringan jalan, jaringan utilitas, pola tata guna lahan sesuai dengan kualitas lahannya.

Paradigma Foley

	Aspek Bukan Ketataruangan (A Spatial)	Aspek Tata Ruang (Spatial)
Normatif (aspek sosial-budaya)	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai-nilai sosial - Perangkat kepranataan - Peraturan perundangan - Teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Distribusi tata ruang pola kultural - Nilai yang berkaitan langsung dengan pola aktivitas dan lingkungan fisik
Fungsional (aspek organisasi dan ekonomis)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian dan agihan fungsi-fungsi - Sistem aktivitas (manusia dan kegiatan usaha dalam peran fungsionalnya - Pertimbangan efisiensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Distribusi tata ruang fungsi-fungsi - Hubungan ketataruangan - Pola tata ruang kegiatan usaha berdasar fungsinya
Fisik (aspek wadah fisik)	<ul style="list-style-type: none"> - Objek-objek fisik - Lingkungan geofisis - Manusia sebagai wujud fisik - Kualitas sumber daya alam 	<ul style="list-style-type: none"> - Distribusi bentuk fisik, bangunan, lahan, jaringan jalan, jaringan utilitas dan lainnya - Tata guna lahan berdasarkan kualitas dan kesesuaian sumber daya alam

Di Indonesia sendiri pandangan teoritik tentang wawasan tata ruang ini sudah lama dikembangkan. Dari berbagai forum dapat ditangkap beberapa wawasan dan pengertian Tata Ruang ini.

Soenaryono Danujo mengemukakan, bahwa penataan ruang adalah penataan lokasi benda, kegiatan dan perubahan di dalam ruang.

Jadi dalam wawasan yang luas, menurut Sunaryono, tata ruang dapat diartikan sebagai: bagian bagian ruang yang disediakan untuk digunakan sebagai tempat benda benda kegiatan dan perubahan. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang yang berisi bumi, maka hasilnya dapat disebut tata guna bumi. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang yang berisi air maka hasilnya dapat disebut tata guna air. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang yang berisi angkasa maka hasilnya dapat disebut tata guna angkasa. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang yang sebagian berisi bumi, sebagian berisi air dan/atau sebagian berisi angkasa kita sebut tata guna ruang atau 'Tata Ruang'. (Soenaryono Danujo, 1987)

I Made Sandy agak lain, ia mengatakan, bahwa penataan ruang baru bisa ada, setelah tanah diperuntukkan dan dikuasai oleh calon yang akan menggunakan tanah itu untuk proyek.

Jadi dalam hal ini ruang artinya sama dengan tanah. Dengan menganggap ruang sebagai genus dan tanah sebagai **species**, maka yang bisa ditata adalah 'tanah' dan bukan 'ruang' (Sandy, 1986).

Pendapat ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan oleh Melvin M. Webber Struktur Tata Ruang Kota merupakan suatu kerangka konsepsi yang bersifat 'generik' (Webber, 1967).

Pada Draft Rancangan Undang Undang Penataan Ruang yang saat ini masih dalam proses pengembangan, dikatakan bahwa Tata Ruang tidak selalu berkonotasi segala yang sudah berencana.

Jadi di sini tata ruang diartikan sebagai "wujud struktural pemanfaatan ruang suatu wilayah baik dengan direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkatan pemanfaatan ruang (Draft RUU Penataan Ruang Versi 17, Januari 1991)".

Secara lebih spesifik dikaitkan dengan sistem teritorial pemerintahan di Indonesia, maka di dalam draft terakhir dari Rancangan Undang-Undang Tata Ruang dikatakan bahwa:

Tata Ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional, ruang wilayah Daerah Tingkat I dan Ruang wilayah Daerah Tingkat II yang mencakup perkotaan dan pedesaan, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan adanya hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang (Bab I. Pasal 1. ayat 2. Draft Rancangan UU Penataan Ruang. Menteri Negara KLH, 1991)

Komponen Tata Ruang

Struktur Tata Ruang pada hakikatnya merupakan hasil dari suatu proses yang mengagihkan obyek obyek fisik dan aktivitas ke suatu kawasan di suatu wilayah (Echenique, 1969).

Wawasan sistem tata ruang ini berlandaskan kepada kerangka konseptual yang diformulasikan oleh beberapa pakar seperti Kevin Lynch dan Lloyd Rodwin (1958); Donald Foley (1964); Melvin M. Webber (1967), Stuart Chapin (1965) dan Peter Hall (1970) yang kesemuanya menekankan kepada adanya kaitan antara dua proses yang saling bergantung.

Pertama, proses yang mengagihkan aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan hubungan fungsional tertentu.

Kedua, proses pengadaan ketersediaan fisik yang menjawab kebutuhan akan ruang bagi aktivitas seperti untuk tempat bekerja, tempat tinggal, transportasi dan komunikasi. Proses ini seperti pengadaan bangunan jalan, utilitas umum dll akan merupakan kendala bagi proses pengagihan aktivitas tersebut (Breheny, 1976).

Ketiga, di dalam proses pengadaan dan pengagihan tatanan ruang ini kaitan antara bagian bagian permukaan bumi di atas mana ditempatkan berbagai aktivitas dengan bagian atas ruang (angkasa) serta ke bagian dalam yang mengandung berbagai sumber daya perlu dilihat dalam wawasan yang integratif.

Jadi berfungsinya suatu tatanan ruang akan sangat ditentukan oleh komponen komponen pembentuknya yang merupakan pengejawantahan dari tatanan aktivitas.

Suatu permukiman mencerminkan pola tata ruang sebagai wadah dan komponen komponennya yang meliputi sistem aktivitas dan wujud fisiknya (Rapoport, 1980).

Komponen tata ruang permukiman sudah disadari pentingnya sejak dikembangkannya pola pemikiran 'perencanaan modern' (modern planning).

Bertolak dari kebutuhan kehidupan yang harus dibentuk di dalam permukiman suatu tatanan ruang maka berbagai pakar telah mengemukakan konsepsinya tentang komponen tata ruang ini. Permukiman sebagai produk tata ruang mengandung arti tidak sekedar fisik saja tetapi juga menyangkut hal hal kehidupan non fisik.

Jadi suatu permukiman atau yang dikatakan sebagai 'settlement' pada dasarnya merupakan suatu bagian wilayah tempat di mana penduduk (pemukim) tinggal, berkisah dalam kegiatan kerja dan kegiatan usaha, berhubungan dengan sesama pemukim sebagai suatu masyarakat serta memenuhi berbagai kegiatan kehidupan (Porteous, 1977; Rapoport, 1980).

Di dalam pemikiran klasik, Patrick Geddes (Tyrwhitt, 1947) memberikan karakteristik tentang permukiman sebagai suatu kawasan yang memiliki 3 komponen pokok yaitu **Place** - tempat tinggal; **Work** - tempat berkarya; dan **Folk** - tempat bermasyarakat.

Hipotesa Doxiadis, mengemukakan bahwa permukiman manusia (human settlement) merupakan suatu totalitas lingkungan yang terbentuk oleh unsur-unsur **Ekistics** yang terdiri dari:

- **Nature** (alami), yaitu bahwa permukiman akan sangat ditentukan oleh adanya alam baik sebagai lingkungan hidup maupun sebagai sumber daya seperti unsur fisik dasar (iklim, topografi, geologi, hidrologi, vegetasi dan fauna);

- **Anthropos** (individu manusia), yaitu permukiman akan sangat dipengaruhi dan mempengaruhi dinamika serta perkembangan kinerja manusia sebagai individu;

- **Society** (masyarakat) bahwa permukiman pada hakikatnya dibentuk karena adanya manusia sebagai kelompok masyarakat;

- **Shells** (ruang kehidupan), yaitu suatu ruang kehidupan yang selengkapanya yang menyangkut berbagai unsur di mana manusia sebagai individu maupun kelompok melaksanakan kehidupannya;

- **Network** (jaringan), yaitu unsur permukiman yang dapat menunjang saling tindak antar berbagai fungsi kegiatan masyarakat, sehingga akan terjadi suatu komunikasi serta jaringan yang berfungsi sebagai penunjang kebutuhan kehidupan lainnya seperti jaringan air bersih, pembuangan, telekomunikasi, listrik.

Ekistics sendiri mengandung arti sebagai pembentukan suatu rumah, tempat tinggal, suatu kota atau suatu koloni (Doxiadis, 1968).

Kus Hadinoto pada awal 70-an (Lokakarya Rancangan Undang Undang Bina Kota, 1971) mengemukakan bahwa permukiman kota khususnya mengandung 5 komponen pokok yang satu sama lain mempunyai hubungan saling bergantung yaitu adanya:

- **Wisma**, yaitu tempat tinggal atau perumahan;
- **Karya**, tempat berkarya dan berkegiatan usaha;
- **Marga**, jaringan pergerakan, jaringan jalan dan sarana perangkutan yang menghubungkan antara berbagai kegiatan fungsional;
- **Suka**, tempat rekreasi dan hiburan,
- **Penyempurna**, yaitu prasarana utilitas, dan pusat pelayanan kegiatan sosial.

Esensi Penataan Ruang dalam Pembangunan Wilayah dan Kota

Komponen tata ruang ini kesemuanya bertolak dari suatu kenyataan bahwa apa yang terbentuk di atas permukaan akan mempunyai kaitan interdependensi secara fungsional maupun substansial dengan

bagian bagian di angkasa dan di dalam bumi sebagai suatu sistem.

Suatu hasil eksplorasi mengenai deposit sumber daya mineral yang terkandung di dalam bagian dalam bumi secara ekonomis akan dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan dengan wilayah yang sudah dikembangkan di atasnya.

Kemajuan teknologi bangunan dan prasarana telah mendorong pembangunan vertikal. Perkembangan ini akan berpengaruh kepada sumber daya alam di angkasa. Selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam yang berada di angkasa serta semakin majunya teknologi komunikasi yang memanfaatkan peranan angkasa akan memerlukan penataan dalam hubungannya dengan perkembangan yang terjadi di atas permukaan bumi.

Kesemuanya ini akan mendorong kepada esensinya suatu usaha penataan ruang dalam wawasan 'tata ruang'.

Rencana tata ruang akan merupakan :

1. Penjabaran rencana penataan ruang suatu wilayah secara integral dari suatu Kebijakan dan Rencana Pembangunan Wilayah.
2. Rumusan tata ruang yang menyangkut arahan penetapan wilayah lindung, wilayah budidaya dan pemanfaatan serta penggunaan lahan bagi suatu wilayah, jaringan prasarana, serta penataan wilayah konservasi yang ditinjau dalam kaitan yang menyeluruh dan integral menyangkut pengaruhnya dengan bagian bagian bawah bumi dan angkasa.